



**PARTISIPASI WARGA ETNIS TIONGHOA DALAM
PILKADA KOTA SEMARANG TAHUN 2015
(Studi kasus Kelurahan Njagalan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial
pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

Satrio Groito Husodo

NIM 3312412083



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :

Hari :

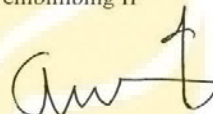
Tanggal :

Pembimbing I



Drs. Setiajid, M.Si
NIP 19600231989011001

Pembimbing II



Moh. Aris Munandar, S.sos, M.M
NIP 197207242000031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

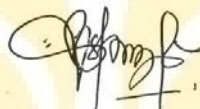
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji I



Puji Lestari, S.Pd.,M.Si.

NIP 197707152001122008

Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si
NIP 19600231989011001

Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.sos, M.M
NIP 197207242000031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini ditulis atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2017



Satrio Groito Husodo

NIM:33124120



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Partisipasi politik Etnis Tionghoa sama halnya dengan mendidik anak bayi ketika Etnis Tionghoa diberikan sosialisasi yang baik dan benar maka partisipasi Etnis Tionghoa akan berjalan baik dan benar juga. Tetapi jika Etnis Tionghoa tidak ditutut dan diarahkan dengan bernar maka partisipasi tidak akan berjalan dengan baik dan benar ”

-Satrio Groito Husodo-

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Alm bapak Alex Wijaya dan ibu Sri Irianti sebagai orang tua kandung yang memberikan do'a dan segalanya.
2. Keluarga Besar Dojang Taekwondo Candi Baru Semarang.
3. Keluarga besar KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
4. Dosen Prodi Ilmu Politik Unnes .
5. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012 yang sama – sama berjuang menyelesaikan studi ini.
6. Almamaterku.

SARI

Husodo, Satrio Groito. 2017. *Partisipasi Warga Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Semarang 2015*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. *Fakultas Ilmu Sosial* Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs.Setiajid, M.Si, dan Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, 84 halaman.

Kata Kunci: Partisipasi, Pilkada, Etnis Tionghoa

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi. Keterlibatan masyarakat Tionghoa di Indonesia di panggung politik bukanlah merupakan hal yang baru. Partisipasi politik dalam sebuah tatanan negara membuat warga negara harus pintar-pintar memilih dan memilah akan keikutsertaannya dalam berpolitik, terutama Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan, Kota Semarang, yang relatif banyak. Perlunya mengetahui lebih dalam tentang seberapa besar partisipasi mereka dalam pilkada untuk kemudian akan dikorelasikan dengan jenjang status sosial mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana masyarakat Etnis Tionghoa berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015? (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung Etnis Tionghoa dalam berpartisipasi politik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Wot Gandul Kelurahan Njagalan Kota Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Metode analisis data dalam penelitian dengan menggunakan Langkah-langkah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang bersifat sukarela. Masyarakat melakukan pemilihan atas kesadarannya sendiri sebagai wujud warga negara yang baik dan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kelurahan Njagalan. 2) Faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang pada pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 terdiri dari kesadaran politik, perasaan tidak mampu, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesibukan dalam pekerjaan. Dari beberapa faktor pendorong dan penghambat tersebut, kesadaran politik masyarakat menjadi pendorong partisipasi politik masyarakat Kelurahan Njagalan Kota Semarang pada Pilkada tahun 2015. Faktor lainnya yang terdiri faktor perasaan tidak mampu, pendidikan politik yang rendah, dan kesibukan dalam pekerjaan menjadi faktor penghambat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2015.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) KPU Kota Semarang perlu mengoptimalkan sosialisasi politik terhadap Etnis Tionghoa untuk meningkatkan kesadaran politik di wilayah Njagalan Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus mengerti faktor penghambat dan pendorong

masyarakat Etnis Tionghoa di Njagalan Kota Semarang dalam memilih calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015 2) Disarankan kepada masyarakat Etnis Tionghoa ikut serta dalam proses politik baik itu tingkat local dan nasional. Kita patut bangga karena suara masyarakat Etnis Tionghoa juga menentukan calon pemimpin dalam pilkada Kota Semarang tahun 2015.



PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi
5. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta sabar dalam membimbing skripsi
6. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberi ilmu pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan.
7. Widodo Indrajanto, S.E, Kades Kelurahan Njagalan Kota Semarang yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini

8. Warga masyarakat Kelurahan Njagalan Kota Semarang yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini
9. Alm. Alex Wijaya dan Sri Irianti orang tua kandung yang memberikan do'a dan segalanya.
10. Keluarga besar Dojang Taekwondo Candi Baru Kota Semarang.
11. Teman – teman detasmen KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
12. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012
13. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Almamaterku

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian do'a semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 16 Februari 2017

Satrio Groito Husodo

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sosialisasi Politik	10
1. Pengertian Sosialisasi Politik	10
B. Partisipasi Politik.....	13
1. Bentuk Partisipasi.....	17
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik	19
3. Pengetahuan Masyarakat Etnis Tionghoa tentang Politik dan Partisipasi Politik.....	22
C. Etnis Tionghoa	
1. Sejarah Etnis Tionghoa	25
2. Hak Etnis Tionghoa.....	26
D. Kerangka Berfikir	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Sumber Data Penelitian	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder	33
D. Fokus Penelitian	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi	35
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
1. Keikutsertaan Peneliti	36
2. Triangulasi	36
G. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Kelurahan Njagalan	40
2. Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa Berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015	
3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Etnis Tionghoa Dalam Berpartisipasi Politik	
B. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Data wawancara	28
3.2 Jumlah warga Kelurahan Njagalan	36
3.3 Jumlah Presentase kehadiran Kelurahan Njagalan	37
3.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Njagalan	43
3.5 Jumlah Perolehan Suara Kelurahan Njagalan.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	24
4.2 Gambar pasangan calon Marmo dan Zuber	39
4.3 Gambar pasangan calon Hendi dan Ita.....	40
4.4 Gambar pasangan calon Sigit dan Agus	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Lampiran 2: Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian

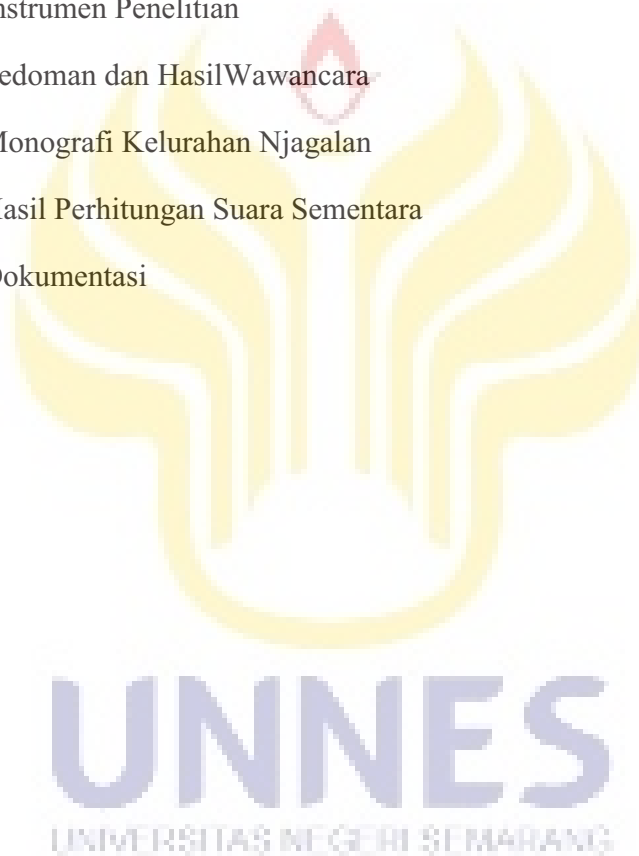
Lampiran 4: Instrumen Penelitian

Lampiran 5: Pedoman dan Hasil Wawancara

Lampiran 6: Monografi Kelurahan Njagalan

Lampiran 7: Hasil Perhitungan Suara Sementara

Lampiran 8: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Saat pemilihan umum, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Ikut serta di dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi. Surbakti (2007:212) Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Surbakti (2007:118) menyatakan bahwa, partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Jadi keikutsertaan dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik sangat penting, karena keikutsertaan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat.

WNI Keturunan Tionghoa merupakan kaum Minoritas dan Marginal sehingga keberadaan masyarakat Tionghoa selalu diwarnai berbagai macam peristiwa yang menarik untuk diamati didalam perpolitik di Indonesia dan tiap

orde pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini membawa dampak pada sikap dan perilaku elit politik masyarakat Tionghoa dari masa ke masa, baik dari masa kolonial, Orde lama, Orde baru, sampai pada masa reformasi sekarang ini. Keterlibatan masyarakat Tionghoa di Indonesia di panggung politik bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi bagaimana hal ini bisa bangkit atau jatuh itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing penguasa terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada masa rezim orde baru, warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah orde baru, dimana mereka tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan politik, bahkan suara mereka tidak pernah diperhitungkan sehingga mereka lebih terkonsentrasi pada masalah ekonomi dari pada masalah politik. Setelah rezim orde baru runtuh dan diganti dengan dan berubah menjadi reformasi, barulah ada angin segar bagi kaum masyarakat Tionghoa untuk berapresiasi dalam dunia politik, dan ini terbukti dengan munculnya beberapa perundang-undangan yang baru untuk mencabut peraturan diskriminatif kepada masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah keputusan Presiden No 19 Tahun 2002 tentang ditetapkannya hari tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, pada Era reformasi masyarakat Tionghoa mulai menyerukan isu-isu lokal tentang penegakan HAM dan juga mulai masuk dan terlibat dalam kehidupan politik Indonesia salah satunya dengan sikap atau partisipasi kelompok minoritas masyarakat Tionghoa dalam pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari pemilu yang secara langsung dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya pembajakan otoritas dari rakyat oleh para wakil lembaga perwakilan. Hal ini terjadi karena di dalam pemilihan secara langsung rakyat bisa menentukan pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki secara lebih otonom.

Dalam melakukan pilihannya, para pemilih tidak sepenuhnya otonom. Hal-hal lain seperti ideologi, keyakinan, dan agama yang dianut, kelas, kelompok, dan relasi-relasi lain, juga bisa berpengaruh terhadap pilihan seseorang, tetapi adanya prosedur bahwa rakyat bisa menentukan pilihannya di bilik pemungutan suara sendiri secara jujur dan adil akan lebih memungkinkan para pemilih lebih otonom.

Kelurahan Njagalan Kota Semarang terletak di wilayah Semarang Tengah yang berada di daerah yang di pusat pertokoan dan wilayah Kelurahan Njagalan juga di dominasi oleh Etnis Tionghoa yang sebagian besar menduduki wilayah ini.

Luasnya partisipasi politik dalam sebuah tatanan negara membuat warga negara harus pintar-pintar memilih dan memilah akan keikutsertaannya dalam berpolitik meskipun hanya dalam bentuk partisipasi politik yaitu dengan ikut pemilihan Bupati atau Kepala Daerah. Sekalipun karena dampak yang akan muncul dari keputusan yang di ambilnya akan mempengaruhi kehidupannya dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat tentu ada konsekuensinya. Terlebih tentang hal-hal seputar dunia politik, yang apabila

salah langkah akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat bahkan tidak jarang ada sanksi sosial yang diberikan masyarakat. Dengan jumlah masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang yang relatif cukup banyak yaitu sekitar ± 70 orang adalah jumlah terbanyak di banding, wilayah-wilayah yang ada di Kota Semarang, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang seberapa besar partisipasi mereka dalam pemilukada yang kemudian akan dikorelasikan dengan jenjang status sosial mereka.

Maksud peneliti mengenai status dan peran mereka (Etnis Tionghoa) dalam Pemilukada yaitu tentang apakah dengan status mereka yang secara garis besarnya dilihat dari jenis pekerjaan maupun pendidikan yang mereka miliki pengaruh yang signifikan dalam peranannya didalam Pilkada. Sebagai contohnya seorang warga Etnis Tionghoa yang berstatus pendidikan tinggi belum tentu memegang peranan yang besar dalam Pilkada karena faktor-faktor intern yang ada pada dirinya atau justru mereka warga Etnis Tionghoa yang berpendidikan rendah namun memegang peranan yang cukup besar dalam Pilkada karena usaha yang dimilikinya tergolong maju sehingga mereka dapat menyuplai dana dalam Pilkada. Atau malah sebagian dari mereka dengan keterbatasan pengetahuan dan juga perekonomian pasif dalam Pilkada, artinya mereka hanya ikut serta memberikan hak suaranya saja dan parahnya bahkan ada juga dari mereka yang mungkin tidak mau ikut dalam kegiatan partisipasi politik seperti halnya Pilkada. Partisipasi politik ini harus diiringi oleh perilaku politik yang harus ada dalam setiap warga masyarakat yang akan mengikuti pemilihan Pilkada, dengan

menggunakan perilaku politik tersebut masyarakat bisa berperilaku sewajarnya dan menggunakan hak memilih yang di dasari oleh keinginan memilih calon wakil rakyat yang kompeten.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan ini adalah masyarakat dan pemerintah. Kegiatan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat (Surbakti, 2010:167).

Bentuk perilaku dan aspirasi yang ditunjukkan masyarakat Tionghoa pada mulanya masih pada taraf ikut berpartisipasi dengan memilih anggota Legislatif dan Eksekutif dalam pemilu dan selanjutnya perilaku mereka lebih berkembang lagi pada saat mereka mencalonkan diri sebagai kandidat dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Dalam pilkada tahun 2015 masyarakat sesuai data yang peneliti peroleh melalui halaman web KPU Kota Semarang sebesar 4.449 pemilih yang tersebar di 10TPS, pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 2.417 orang, dengan demikian ada sebesar 2.032 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, diantara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya terdapat pemilih dari keturunan etnis tionghoa, dimana berdomisili di warga masyarakat Kecamatan Wot Gandul banyak bermukim warga Kota Semarang yang merupakan warga keturunan Etnis Tionghoa. Kebanyakan dari mereka tidak begitu antusias dalam

kegiatan politik karena di latarbelakangi oleh beberapa alasan antara lain masalah visi dan misi tidak sesuai dengan keinginan mereka, masalah figur yang tidak menguntungkan bagi keberadaan dan kelancaran usaha mereka. Dan mungkin ada alasan yang lain membuat mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang permasalahan diatas mengenai partisipasi warga Etnis Tionghoa terhadap Pilkada Kota Semarang, maka penulis tertarik mengangkat penelitian tentang “PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA KOTA SEMARANG 2015.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana masyarakat Etnis Tionghoa berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Etnis Tionghoa dalam berpartisipasi politik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung masyarakat Etnis Tionghoa dalam berpartisipasi politik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan menambah pengalaman bagi peneliti tentang kenyataan yang ada dilapangan khususnya mengetahui tentang tingkat partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015 di Kelurahan Njagalan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan refrensi bagi kalangan atau dunia akademis (kampus) dalam melihat sebuah fenomena politik, secara khusus adalah mengetahui tingkat partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengangkat minat masyarakat Etnis Tionghoa lebih peka terhadap perpolitikan di Kota Semarang khususnya di wilayah Wot Gandul Kelurahan Njagalan.

E. Batasan Istilah

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi salah tafsir mengenai judul penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang akan dicapai menjadi jelas maka perlu untuk memberikan batasan penegasan judul yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Partisipasi politik

Partisipasi Politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum (Surbakti, 2010:151).

Partisipasi menurut penelitian ini adalah partisipasi warga masyarakat yang bisa membangun dalam kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Tingkat partisipasi Etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Wot Gandul kelurahan Njagalan Kota Semarang dari Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 tingkat golput dari tahun ke tahun semakin berkurang tetapi warga masyarakat Etnis Tionghoa belum berpartisipasi.

Bentuk partisipasi politik masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang dilakukan melalui berbagai bentuk partisipasi yaitu terdiri dari: a) Diskusi politik informal Partai Politik, b) Pemungutan suara (*voting*), c) Kegiatan Kampanye politik, d) Diskusi Politik Informal masyarakat, e) Menjadi panitia pemungutan suara.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah melalui suatu kompetisi dan proses politik, dan rakyat lokal dapat menerima proses yang sudah berjalan demi menciptakan kesejahteraan bersama (Juliansyah, 2007 : 10).

Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetisi antara calon-calon walikota dan wakil walikota yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang dalam proses perpolitikan, pemilihan Kepala daerah ini yang akan melibatkan partisipasi warga masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

3. Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa adalah Etnis yang beda dengan Etnis yang lain yang ada di Indonesia, biasanya Etnis yang ada di Negara Indonesia ini ada yang berasal dari mana-mana seperti Etnis Madura, Etnis Jawa dan Etnis Sunda. Perbedaan mereka bisa dilihat dengan warna kulit dan bahasa yang hampir sama dengan bahasa kita tapi mereka sedikit merubah bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dimana mereka tinggal.

Tionghoa adalah salah satu Etnis di Indonesia yang asal usul mereka dari Tiongkok. Etnis Tionghoa juga termasuk orang Indonesia yang berarti sudah menjadi orang Indonesia yang bebas memilih dan mempunyai hak untuk memilih siapa pemimpin yang akan mewakili mereka dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015.

Etnis Tionghoa ini tidak menutup kemungkinan boleh mencalonkan menjadi wakil rakyat dikarenakan mereka sudah menjadi warga negara tetap dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

Etnis Tionghoa berperan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Sejak berdirinya Partai Tionghoa Indonesia, beberapa orang Tionghoa seperti Kho Sien Hoo bergabung dengan gerakan kemerdekaan. Setelah Negara Indonesia terbentuk, maka secara otomatis etnis Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan menjadi salah satu suku dalam lingkup Indonesia dan sejajar dengan suku-suku lain.

Kebudayaan dan kehidupan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaannya. Kepercayaan yang dianut etnis Tionghoa adalah Budha, Taoisme, dan Konfucionisme dimana ajaran Konfucionisme lebih dominan dianut oleh Etnis Tionghoa dimana mengajarkan tentang moralitas yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kunci ini dipakai Konfusius untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat (Surbakti, 2010:149-150).

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi politik dapat disebarluaskan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan pendidikan politik. Menurut Good dalam Prihatmoko (2003:138) menyatakan bahwa “dalam paradigma demokratis, pendidikan politik adalah

pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik”.

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

Sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu: (1) Dalam arti sempit adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab. (2) Sedangkan dalam arti luas adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan (Djuyandi, 2014: 1205).

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui

proses ini masyarakat bisa mengenal dan mempelajari tentang nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik (Surbakti, 2010:150).

Yang dimaksud dengan indokrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum penghargaan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik (Surbakti, 2010:150).

Sosialisasi politik bisa diartikan sebagai penjelasan atau penggambaran tentang pengertian politik dalam dunia perpolitikan. Dengan cara sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah atau calon-calon yang akan maju dalam PILKADA untuk masyarakat, supaya masyarakat mengerti lebih jelasnya dan tidak hanya mengira-ngira dengan ilmu tentang politik yang seadanya.

Sosialisasi biasanya dilakukan oleh calon-calon yang akan maju dalam pilkada dan sekaligus kampanye dalam bentuk sosialisasi atau penjelasan tentang visi misi calon-calon yang akan maju dalam PILKADA Kota Semarang. Sosialisasi juga sangat lah efektif untuk lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih bisa mengenal lebih dekat dengan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengadakan sosialisasi dilingkungan masyarakat tersebut.

Pengertian sosialisasi bisa diartikan menjelaskan apa yang akan di sosialisasikan dengan cara melakukan presentasi dengan peserta sosialisasi dengan mendapatkan perilaku sikap yang akan diterapkan di wilayah sekitar dan sosialisasi bisa diartikan sebagai membimbing individu kedalam dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).

B. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh-kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional (Sastropetro, 1988:12).

Warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi, partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai warga negara) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni mempengaruhi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik (Surbakti, 2010:180).

Pernyataan berikut, kegiatan macam apakah yang dikategorikan sebagai partisipasi politik? Hal ini menyangkut konseptualisme tentang partisipasi politik. Konseptualisasi merupakan upaya menyusun “rambu-rambu” sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak masuk ke dalam konsep itu. Jadi, penentuan rambu-rambu setidaknya-tidaknyanya bersifat manusuka sepanjang didasari dengan penalaran tertentu (Surbakti, 2010:180).

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menantang keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, baik kegiatan yang berhasil (*efektif*) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara (*individu*) dapat dilakukan secara langsung atau tidak secara langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*) serta ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (*tak konvensional*) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (*unjuk rasa*), melakukan pembangkangan halus (*seperti lebih memilih kotak kosong dibanding memilih calon yang disodorkan pemerintah*), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta revolusi (Surbakti, 2010:181).

Dalam beberapa hal, kategorisasi hal itu tidak jelas, seperti apakah demonstrasi, mogok atau pembangkangan sipil apakah dapat dikategorikan sebagai hak konvensional? Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor apakah lembaga dan mekanisme penyaluran aspirasi berfungsi atau tidak? Apakah cara-cara tak konvensional dan kekerasan dapat dikategorikan ke dalam partisipasi politik?

Hal itu bergantung pada sistem politik masyarakat negara yang bersangkutan, apakah telah melembaga dan mendapat dukungan yang kuat dari sebagian terbesar masyarakat? Pada sistem politik yang mantap, melembaga, dan mendapat dukungan, barangkali hanya kegiatan-kegiatan konvensional dan tidak berupa kekerasan yang hendaknya dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik (Sastropetro, 1988:32).

Selanjutnya mengenai kegiatan individu untuk memengaruhi pemerintah, ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri (*kegiatan otonom atau self motion*), senada pula yang dilakukan atas desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain (*mobilisasi*). Dalam kenyataan hal ini seringkali sukar dibedakan, maka baik kegiatan yang otonom maupun mobilisasi termasuk dalam kategori partisipasi politik. Namun, bila konsep partisipasi politik digunakan sebagai salah satu indikator totaliter, sebaiknya kegiatan otonom saja yang dikategorikan sebagai partisipasi politik (Surbakti, 2010:182).

Partisipasi itu sendiri bisa diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat dalam ranah politik dan masyarakat bisa memilih atau dipilih untuk dan bisa disebut juga sebagai masyarakat bisa mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan iktu serta dalam menentukan pemimpin untuk pemerintahan. Masyarakat bisa mengajukan kritik dan saran untuk calon walikota dan wakil walikota supaya kedepan lebih baik dan lebih bisa merangkul

masyarakat yang belum tau tentang politik, lebih bagus lagi calon yang dipilih bisa melakukan sosialisasi untuk masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti dan peka terhadap ranah perpolitikan.

1. Bentuk Partisipasi

Pada dasarnya, bentuk partisipasi seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat, entah untuk memilih kepala Negara. Dalam buku Pengantar Sosialisasi Politik, (Maran, 2007:147-148). Bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut: (1) Menduduki jabatan politik atau administratif; (2) Mencari jabatan politik atau administratif; (3) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (4) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (5) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik; (6) Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik; (7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya; (8) Partisipasi dalam diskusi politik informal; (9) Partisipasi dalam pemungutan suara.

Pengindentifikasian bentuk-bentuk partisipasi diatas, yang oleh Rush dan Althoff disebutlah hierarki partisipasi politik. Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik. Tetapi dari masing-masing tingkat

partisipasi tersebut bisa berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lain (Maran, 2007:148-149).

Sementara menurut Almond, bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga Negara (Maran, 2007:148-149).

Partisipasi Politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam

sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri (Sastropetro:1995,11).

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond:

1) Konvensional Non-konvensional:

- a) Pemberian suara (*voting*)
- b) Pengajuan petisi
- c) Diskusi politik
- d) Berdemonstrasi
- e) Kegiatan kampanye
- f) Membentuk dan bergabung dalam satu kepentingan
- g) Komunikasi individual dengan pejabat/administratif
- h) Kekerasan politik terhadap harta benda: pembakaran, pengeboman dan perusakan
- i) Kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolus.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik:

- a) Faktor Sosial Ekonomi:

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

b) Faktor politik

Arnstein S.R (1969) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

1) Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik (Nimmo, 1993:8). Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika (Surbakti, 1993:199).

2) Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000, 14). Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan (Budiarjo, 1985:22).

3) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (Surbakti 1992:196).

4) Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu (Arnstein, 1969:215) kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat (Widodo, 2000:192), untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan actual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan (Cristina, 2001:71).

c) Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum.

Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting, 1993:13).

d) Faktor Nilai Budaya.

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1999:25), Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27) atau peradaban

masyarakat (Verba, Sholosman, Bradi, 1995). Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

3. Pengetahuan Masyarakat Etnis Tionghoa tentang Politik dan Partisipasi Politik

Berdasarkan beberapa definisi Partisipasi Politik menurut para ahli, mengatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam PILKADA, Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, Politiknya masih tergolong rendah dan hanya sebatas ikut memilih pada saat pemilu maupun pilkada. Sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di negara yang dimaksud. Diketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Politiknya masih tergolong rendah dan hanya sebatas ikut memilih pada saat pemilu maupun pilkada. Dan jika dikategorikan menurut bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti adalah partisipasi politik pasif, seperti kegiatan menaati Pemerintah, menerima dan melaksanakan semata-mata keputusan pemerintah. Biasanya warga Etnis Tionghoa dalam bentuk partisipasi pasif, partisipasi yang dilakukan hanya sekedar ikut serta

dalam memilih dan itu semua juga hanya mengikuti aturan dari pemerintah yang mengharuskan warga negara indoneisa mengikuti partisipasi tanpa mau mengikuti berbagai macam diskusi politik maupun rapat kepentingan PILKADA.

C. Etnis Tionghoa

1. Sejarah Etnis Tionghoa

Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("To lo mo") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra. Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Tionghoa disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anakbenua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, *Juru Cina*, yang berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok.

Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Tionghoa muslim menghuni ibukota dan kota-kota

bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu. Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu. Di kompleks ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki "Mbah Jurumudi Dampo Awang".

2. Hak Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa pada dasarnya juga mempunyai hak berpartisipasi politik dan mempunyai hak untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nanti akan memimpin mereka, walaupun masyarakat Etnis Tionghoa dalam masalah politik kurang tidak menutup kemungkinan masyarakat Etnis Tionghoa yang lain tidak aktif dalam berpartisipasi politik dan biasanya ada salah satu masyarakat Etnis Tionghoa yang aktif dan mau mengajak atau mendorong masyarakat Etnis Tionghoa yang lain akan mau berpartisipasi demi kelangsungan hidupnya dan dalam masalah usaha yang mereka miliki menjadi lancar ketika masyarakat Etnis Tionghoa memilih dan mendapatkan pemimpin yang bisa menguntungkan mereka dan menjaga mereka dengan baik diwilayah

Kota Semarang. Oleh sebab itu masyarakat Etnis Tionghoa harus mau dan menggunakan haknya dengan benar untuk menjadikan mereka lebih sejahtera jika tidak memberikan haknya bisa jadi mereka akan memiliki pemimpin yang salah dan dapat merugikan mereka.

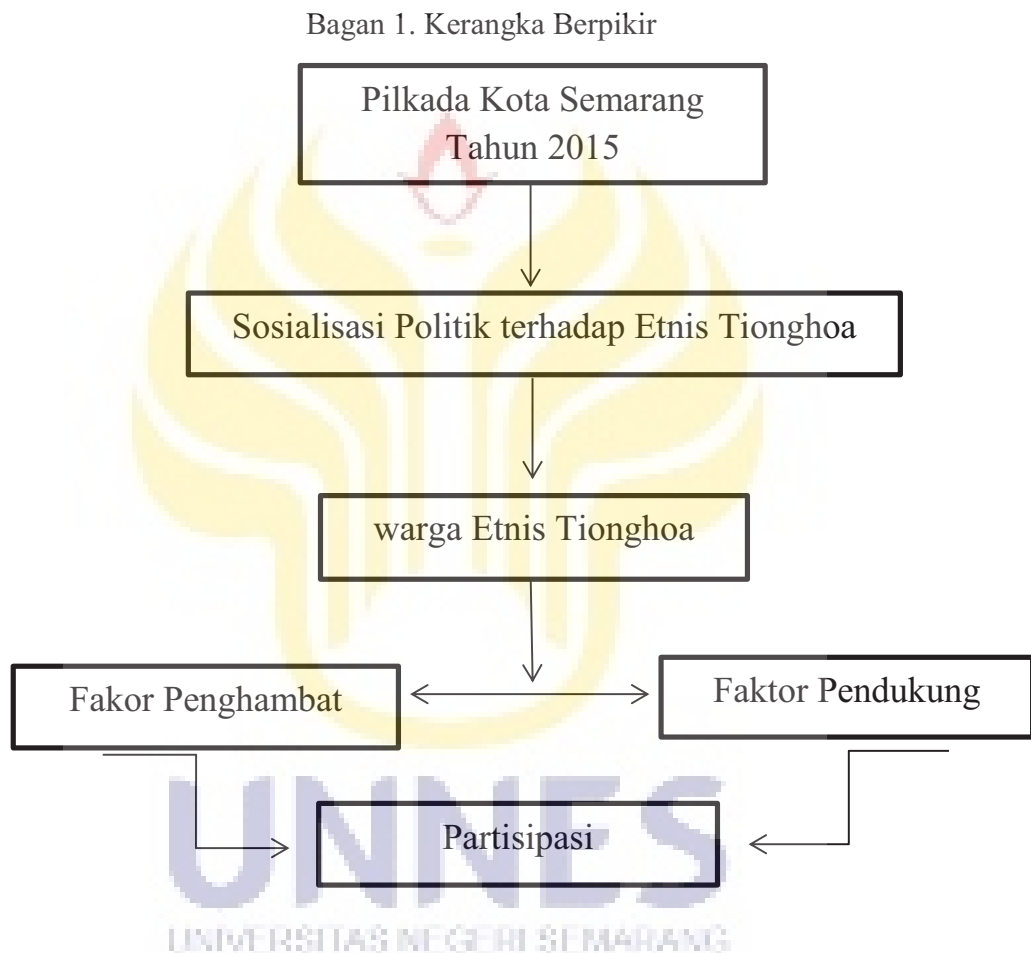
D. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah kerangka yang bersifat teoristis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan hubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Pemilihan kepala daerah Kota Semarang tahun 2015 melibatkan berbagai elemen lapisan masyarakat. Terlebih dalam hal ini keterlibatan masyarakat Etnis Tionghoa di Njagalan, Kota Semarang. Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang juga memiliki faktor penghambat dan pendukung atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik sangat menentukan hasil pemilihan kepala daerah Kota Semarang.

Keterlibatan pemerintah Kota Semarang dalam pemilihan umum kepala daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pemilu. Keterlibatan pemerintah berguna dalam upaya menanggulangi berbagai hambatan di masyarakat dalam hal partisipasi

politik. Tujuan utamanya jelas bahwa warga Etnis Tionghoa agar dapat berpartisipasi penuh dalam pemilihan umum Kota Semarang tahun 2015.





UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Partisipasi politik masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang dilakukan atas dasar sukarela. Masyarakat Etnis Tionghoa di Njagalan berbeda dengan Kelurahan yang lain dikarenakan banyaknya Etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Njagalan. Tergantung pada kultur politik yang ada pada masyarakat Etnis Tionghoa. Masyarakat melakukan pemilihan atas kesadarannya sendiri yang berdampak langsung pada usaha masyarakat Etnis Tionghoa. Calon kandidat ditinjau dari janji politik yang diberikan untuk usaha masyarakat Etnis Tionghoa yang ada di Kelurahan Njagalan.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Njagalan Kota Semarang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015. a) Kesadaran Politik yang rendah, kesibukan dalam pekerjaan serta sosialisasi KPU yang kurang maksimal untuk wilayah ini. b) masyarakat Etnis Tionghoa cenderung memilih calon atas dasar keuntungan dalam usaha masyarakat Etnis Tionghoa. c) Kurangnya antusias tentang berpolitik di wilayah Njagalan ini. Faktor pendorong masyarakat a)

kesadaran politik. b) pendidikan politik. c) sosialisasi politik dari partai politik dan KPU Kota Semarang.

B. Saran

1. KPU Kota Semarang perlu mengoptimalkan sosialisasi politik terhadap Etnis Tionghoa untuk meningkatkan kesadaran politik di wilayah Njagalan Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus mengerti faktor penghambat dan pendorong masyarakat Etnis Tionghoa di Njagalan Kota Semarang dalam memilih calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015.
2. Disarankan kepada masyarakat Etnis Tionghoa ikut serta dalam proses politik baik itu tingkat lokal dan Nasional. Kita patut bangga karena suara masyarakat Etnis Tionghoa juga menentukan calon pemimpin dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar - dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- DAWIS, AIMEE. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa mencari identitas*: PT. Gramedia PustakaUtama.
- Djuyandi, Yusa. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif*. Jakarta. Binus University.
- Almond, Gabriel A & Sidney Verba, *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta : Bumi Angkasa, 1990.
- Elvi Juliansyah. 2007. *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Junadi, Yudi, 2005. *Pilkada Langsung dan Pemerintahan Daerah yang Dinamis*. Surakarta: KOMPIP
- Kinloch, Graham C. 2005. *Perkembangan dan Paradigma Utama*. Bandung: Pustaka Setia
- Laode, Harjudin. 2005, *Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP
- M.D.LA ODE. 2012. *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*: Pustaka Obor Indonesia

- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan, 2000. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Raga Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Salim, Said. 2006. *Kebijakan Etnis Politik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sastropetro, Santoso. R.A. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*.
- Setiono, Beni G. 2002. *Tionghoa dalam pusaran Politik*. Jakarta: (ELKASA)
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadinata, Leo . 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa*. Jakarta : LP3ES.
- Syahrial, Syarbaini. Dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Untoro, Suryo. 1976. *Pokok-Pokok Pengertian Pemilu*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Yoest MSH. 2004. *Tradisi dan Kultur Tionghoa*. Jakarta: Gerak Insan Mandiri.